

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* di Thailand sebagai negara transit menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat berperan sebagai aktor yang menjembatani prinsip, norma, aturan global dan pelaksanaan di tingkat domestik. Dalam hal ini, IOM telah berperan aktif dalam mengoperasionalkan norma-norma yang diatur dalam UNTOC dan Protokol Palermo, dengan *policy support*, *victim protection*, dan *repatriation assistance* melalui *National Referral Mechanism* (NRM), pelatihan bagi aparat negara, serta memberikan bantuan langsung bagi korban perdagangan manusia. Peran ini menunjukkan bahwa IOM tidak hanya berfungsi sebagai aktor normatif, tetapi juga sebagai pelaksana teknis yang mendukung negara dalam menerjemahkan komitmen internasional menjadi praktik nyata di lapangan. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari korban yang teridentifikasi melalui NRM, dari 138 korban tahun 2022 menjadi 517 korban tahun 2023, yang mana korban yang teridentifikasi merupakan korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan kejahatan di pusat penipuan *online*. Peningkatan ini menunjukkan bahwa mekanisme yang dikembangkan oleh IOM telah diterapkan secara nyata dalam proses identifikasi korban.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan dengan optimal. Meskipun mekanisme perlindungan dan identifikasi

korban telah diperkuat, kasus perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan IOM dapat terlihat pada aspek penguatan kapasitas dan perlindungan korban, dibandingkan pada aspek pencegahan dan penghilangan akar permasalahan yang memungkinkan perdagangan manusia terus berlangsung. Keterbatasan ini berasal dari IOM dan Thailand sebagai negara transit, dimana IOM yang bersifat struktural karena IOM adalah organisasi internasional non-koersif yang hanya dapat beroperasi berdasarkan persetujuan negara, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kepatuhan negara dan memberikan sanksi. Selain itu, NRM di Thailand sangat bergantung pada pendanaan dari *IOM Development Fund*. Dengan kata lain, IOM mampu menciptakan mekanisme yang kuat secara normatif, tetapi tidak memiliki kemampuan mandiri untuk memastikan penerapannya berjalan dengan baik tanpa dukungan pendanaan dan negara. Disisi lain dari Thailand sebagai negara transit, terdapat dua faktor utama yang saling berkaitan yaitu *state vulnerability* dan *weak jurisdiction control*. Pertama kondisi *state vulnerability* yang menunjukkan bahwa Thailand mengalami kelemahan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya secara optimal. Hal ini tercermin dari adanya praktik korupsi di kalangan penegak hukum dan imigrasi, keterbatasan dalam penegakan hukum, serta rendahnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Kerentanan ini menyebabkan mekanisme seperti NRM yang didukung oleh IOM, tidak dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah. Dengan demikian, meskipun IOM telah menyediakan kerangka kerja dan dukungan teknis,

keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan negara sebagai pelaksana utama di tingkat domestik.

Selain itu, *weak jurisdiction control* yang menunjukkan bahwa Thailand tidak mampu menegakkan kontrol wilayahnya secara merata, terutama di wilayah perbatasan. Kawasan Mae Sot-Myawaddy yang mencerminkan adanya zona abu-abu dimana otoritas negara tidak dapat mengawasi aktivitas yang berlangsung di seberang perbatasan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh jaringan kriminal untuk menciptakan *safe havens*, sehingga skema *pig butchering* dapat terus berkembang meskipun adanya upaya dari pemerintah maupun dukungan dari IOM. Dalam hal ini, peran IOM menjadi terbatas karena tidak memiliki kewenangan untuk melampaui batas yang berada di bawah kendali negara. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan rezim internasional bergantung pada sejauh mana negara mampu melaksanakannya. IOM telah berhasil dalam pengembangan mekanisme, namun masih menghadapi tantangan sebagai organisasi internasional yang non-koersif, dimana pelaksanaannya bergantung pada kemauan negara dan dukungan pendanaan dari luar. Selain itu, kondisi kerentanan negara dan kontrol yurisdiksi yang lemah di Thailand menunjukkan bahwa negara belum mampu mendukung pelaksanaan rezim dengan baik. Interaksi antara keterbatasan IOM dan kondisi domestik Thailand sebagai negara transit menyebabkan upaya untuk menangani skema *pig butchering* berakhir pada tingkat teknis dan belum mampu menjangkau akar permasalahan secara menyeluruh.

4.2. Saran Penelitian

Penelitian ini telah memberikan jawaban atas rumusan masalah terkait bagaimana peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam mendukung upaya Thailand untuk menangani perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* di Thailand sebagai negara transit selama pandemi COVID-19 tahun 2019-2023. Analisis menggunakan teori rezim internasional yang didukung oleh konsep *state vulnerability* dan konsep *weak jurisdiction control* menjadi faktor kunci yang menjelaskan mengapa peran IOM belum sepenuhnya optimal dalam menangani perdagangan manusia melalui skema *pig butchering*. Berkaitan dengan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini juga telah menghasilkan temuan teoritis yang relevan. Namun, penelitian ini juga memiliki saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk mengeksplorasi lebih jauh, penelitian selanjutnya tidak hanya berfokus pada peran IOM sebagai aktor dalam rezim internasional, tetapi juga dapat mengkaji perdagangan manusia melalui skema *pig butchering* dari perspektif Myanmar sebagai pusat penipuan *online*. Peneliti selanjutnya dapat menganalisis bagaimana situasi politik dan keamanan domestik Myanmar dikarenakan adanya aktor bersenjata non-negara di wilayah perbatasan yang mana ikut berperan dalam berkembangnya jaringan perdagangan manusia dan penipuan *online* melalui skema *pig butchering*.